

## LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

tahun : 2021

PENILAIAN	Bobot	Jawaban	Nilai	%	Keterangan	Catatan Evaluator
A. PROSES (60)	60		55,59	92,65%		
I. MANAJEMEN PERUBAHAN	8		8	100,00%		
1 Tim Kerja (1)	1		1	100,00%		
Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk						
a. melakukan pembangunan Zona Integritas ?	YA		1		<a href="https://drive.google.com/file/d/1-fZmTG44hU8GoKMTToyJX7fcUi7flwgWN/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-fZmTG44hU8GoKMTToyJX7fcUi7flwgWN/view?usp=sharing</a>	
Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan						
b. dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?	A		1		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AcPuD6vY-LugPh1c9w12jnM_7Inx-SKP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AcPuD6vY-LugPh1c9w12jnM_7Inx-SKP/view?usp=sharing</a>	
2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2)	2		2	100,00%		
Apakah ada dokumen rencana kerja						
pembangunan Zona Integritas menuju						
a. WBK/WBBM ?	YA		1			
Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat						
target-target prioritas yang relevan dengan						
b. tujuan pembangunan WBK/WBBM?	A		1		<a href="https://drive.google.com/file/d/1Gq63TOrcatc7K13OYx1yb0YuMuKoDG7n/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Gq63TOrcatc7K13OYx1yb0YuMuKoDG7n/view?usp=sharing</a>	
Apakah terdapat mekanisme atau media untuk						
c. mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	A		1			
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan						
3 WBK/WBBM (2)	2		2	100,00%		
Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah						
a. dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	A		1			
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap						
b. pembangunan Zona Integritas	A		1		<a href="https://drive.google.com/file/d/1hc6tePXvpdkeoO6ww09DbZsoW1GzYAgO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hc6tePXvpdkeoO6ww09DbZsoW1GzYAgO/view?usp=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1g5KPaL-Q44t8ONP-IT3qFWR1i14NNoc5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1g5KPaL-Q44t8ONP-IT3qFWR1i14NNoc5/view?usp=sharing</a>	
Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah						
c. ditindaklanjuti ?	A		1			

4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3)	3	3	100,00%	
Apakah pimpinan berperan sebagai role model				
a. dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	YA	1		<a href="https://drive.google.com/file/d/1w9VYcU73aBeB7fepf4elE3ItW7a2zskQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1w9VYcU73aBeB7fepf4elE3ItW7a2zskQ/view?usp=sharing</a>
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	A	1		<a href="https://drive.google.com/file/d/1BW53LhhbiK-jnrHahteha1eJk-fgiis5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1BW53LhhbiK-jnrHahteha1eJk-fgiis5/view?usp=sharing</a> Data dukung belum menunjukkan agen perubahan berkontribusi terhadap unit kerjanya
Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?				
c. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju	A	1		<a href="https://drive.google.com/file/d/1fgFHOldM8uJeOAx7ubK93wsaktqbMVzT/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fgFHOldM8uJeOAx7ubK93wsaktqbMVzT/view?usp=sharing</a> Data dukung belum menunjukkan pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan
d. WBK/WBBM?	A	1		<a href="https://drive.google.com/file/d/1_x7o7BPUp9y24STGsNaQ9TCGe-DrzDX0/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1_x7o7BPUp9y24STGsNaQ9TCGe-DrzDX0/view?usp=sharing</a>
II. PENATAAN TATALAKSANA	7	5,11	73,00%	
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama				
1 (2)	2	1,61	80,67%	
Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis				
a. instansi	B	0,67		semua Unit SOP pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah mengacu peta proses bisnis <a href="https://drive.google.com/file/d/1fV4Gq8AmTh-PX6ehT4CrssNRs3og227d/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fV4Gq8AmTh-PX6ehT4CrssNRs3og227d/view?usp=sharing</a>
Prosedur operasional tetap (SOP) telah				
b. diterapkan	B	0,75		Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi <a href="https://drive.google.com/file/d/1fV4Gq8AmTh-PX6ehT4CrssNRs3og227d/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fV4Gq8AmTh-PX6ehT4CrssNRs3og227d/view?usp=sharing</a>
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi				
c.	A	1		Seluruh SOP utama pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah dievaluasi <a href="https://drive.google.com/file/d/1I1D_mIsAHYgj68iC-WYfttSFeG2XxFZ4/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1I1D_mIsAHYgj68iC-WYfttSFeG2XxFZ4/view?usp=sharing</a>

2 E-Office (4)

4

2,5 62,50%

Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah  
a. menggunakan teknologi informasi?

B

0,5

Sistem Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah menggunakan aplikasi e-LLK, SIKEP, SKP, MIS dan Kinerja penyelesaian perkara melalui Aplikasi SIPP  
<https://drive.google.com/file/d/1pU1PkvSicb1RSMMpOwyHUvlnLs1eC8XX/view?usp=sharing>

Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah  
b. menggunakan teknologi informasi?

B

0,5

Operasionalisasi Manajemen SDM pada Pengadilan Negeri Pandeglang Telah Menggunakan aplikasi SIKEP  
<https://drive.google.com/file/d/1laGJzH8HjQW4sQK0tiMCbt1r6ah2ogJ/view?usp=sharing>

Apakah pemberian pelayanan kepada publik  
c. sudah menggunakan teknologi informasi?

B

0,5

Pemberian Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Pandeglang Telah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi Siwas, Apliasi PTSP, Aplikasi SIPP, E-court, eraterang, IKM, e-tilang, Aplikasi QR Code Barang Milik Negara (BMN), Aplikasi QR Code Data Pegawai Dan Aplikasi E-Brosur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Web Pengadilan Negeri Pandeglang serta dalam bentuk Media sosial seperti Facebook, Instgram dan Youtube  
<https://drive.google.com/file/d/1SBuem3gDSiB6xRbh4ZufZk0kQwBHYZ6v/view?usp=sharing>

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan					Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah dilakukan perbulan <a href="https://drive.google.com/file/d/1q0nZOTEa1xiR6aVfgWEQscW4TMIF1u7s/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1q0nZOTEa1xiR6aVfgWEQscW4TMIF1u7s/view?usp=sharing</a>
d. kepada publik?	A	1			
3 Keterbukaan Informasi Publik (1)	1	1	100,00%		
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	A	1			kebijakan tentang keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Pandeglang sudah diterapkan <a href="https://drive.google.com/file/d/1ypXh7B5n2XZ_78tDaYxXjBAPzi2bcUdd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ypXh7B5n2XZ_78tDaYxXjBAPzi2bcUdd/view?usp=sharing</a>
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A	1			Pengadilan Negeri Pandeglang telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan keterbukaan informasi publik <a href="https://drive.google.com/file/d/1dhbQPZ3NHjITuGL-ZZfOkXDxF9PEeGgH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dhbQPZ3NHjITuGL-ZZfOkXDxF9PEeGgH/view?usp=sharing</a>
<b>III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>		
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan					
1 Kebutuhan Organisasi (0,5)	0,5	0,5	100,00%		
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?	YA	1			Iya kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja sudah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan <a href="https://drive.google.com/file/d/1a8i__1JagXBxMCUGaWcvom9Ebv7OBWsl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1a8i__1JagXBxMCUGaWcvom9Ebv7OBWsl/view?usp=sharing</a> Data dukung kebutuhan pegawai tidak mengacu kepada peta jabatan dan analisis beban kerja
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?	A	1			Iya semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Data dukung tidak sesuai pertanyaan

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?	YA	1		Iya sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
2 Pola Mutasi Internal (1)	1	1	100,00%	
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?	YA	1		Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai pada bulan Januari dan Februari 2021. Iya semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini.
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	A	1		
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	YA	1		Iya sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5)	2,5	2,5	100,00%	
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?	YA	1		Iya sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi melalui Diklat Online.
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	A	1		Iya semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	A	1		Iya sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75% lyaseluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	A	1		

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?	A	1		Iya unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai melalui pengikutsertaan Diklat Online. Iya laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan.
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	A	1		
4 Penetapan Kinerja Individu (4)	4	4	100,00%	
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A	1		Iya seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi. <a href="https://drive.google.com/file/d/1zVrHbkVp5uW02ildikwwKaRqlbDPJ0E4/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1zVrHbkVp5uW02ildikwwKaRqlbDPJ0E4/view?usp=sharing</a>
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A	1		Iya seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. <a href="https://drive.google.com/file/d/1XbfBBq2L6GXbzplAG2pEmEo6RUtqVkg3/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XbfBBq2L6GXbzplAG2pEmEo6RUtqVkg3/view?usp=sharing</a>
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	A	1		Iya pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan <a href="https://drive.google.com/file/d/1uwH5SPaxNP_GxHf48TiPsVvhsYBPFifa/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1uwH5SPaxNP_GxHf48TiPsVvhsYBPFifa/view?usp=sharing</a>
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	YA	1		Iya penilaian kinerja individu seluruhnya dijadikan dasar pemberian reward yaitu dengan penghargaan kenaikan pangkat dan Satya Lencana.
5 Pegawai (1,5)	1,5	1,5	100,00%	

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	A	1		Iya unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. <a href="https://drive.google.com/file/d/1wgqDg-arTZKr6hrDoHuttgiOdgVMBj6X/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1wgqDg-arTZKr6hrDoHuttgiOdgVMBj6X/view?usp=sharing</a>	Tidak ada data dukung inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai karakteristik unit kerja
6 Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)	0,5	0,5	100,00%		
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	A	1		Iya data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan.	
<b>IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>		
1 Keterlibatan Pimpinan (5)	5	5	100,00%		
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	A	1		Ya. pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A	1		Ya. pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1		Ya. pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5	5	100,00%		
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	YA	1		Ya. unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja)	
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	YA	1		Ya. seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;	
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	YA	1		Unit kerja telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi.	
d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Spesifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)	A	1		Ya. Seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART	
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	YA	1		unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.	

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A	1			Ya. seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	YA	1			Unit kerja Sudah berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	A	1			Ya. pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
<b>V. Penguatan Pengawasan</b>	<b>15</b>	<b>13,49</b>	<b>89,93%</b>		
1 Pengendalian Gratifikasi (3)	3	3	100,00%		

1. Rencana Kerja Area V Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PN Pandeglang, Indikator Pengendalian Gratifikasi, kegiatan yang akan dilakukandiantaranya: a. Membuat kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi; b. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di PN Pandeglang 2. Time Frame Rencana Kerja Area V Pembangunan ZI; 3. Target Capaian Area V Pembangunan ZI (Khusus untuk sub komponen pengendalian gratifikasi direncanakan seluruh agenda kegiatan telah terlaksana 100% pada tahun 2020) Telah dilakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada PN Pandeglang, Telah dilaksanakan kegiatan public campaign pengendalian gratifikasi oleh PN Pandeglang dengan mengadakan kegiatan pembagian stiker gratifikasi kepada para pengguna jalan yang melintas di depan kantor PN Pandeglang. 3. Untuk kegiatan tahun 2021 kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilakukan memutar audio pencegahan gratifikasi setiap 2 jam sekali pada hari kerja baik di areal pelayanan meja PTSP maupun pada ruang tunggu pengunjung sidang

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	A	1			
---	---	---	--	--	--



b. Pengendalian gratifikasi telah b. diimplementasikan	<b>A</b>	1		Untuk tahun 2021 Unit kerja telah melakukan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi: sosialisasi pengendalian gratifikasi, membuat SK Pedoman Penanganan Gratifikasi, membentuk Pejabat Penanganan Laporan Gratifikasi dan Tim Pemeriksa Penerimaan Gratifikasi Melakukan pelaporan periodek LHKPN dan LHASN tahun 2021, adanya CCTV & ruang tamu terbuka serta penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama tahun 2021. Inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang dibuat tahun 2021 adanya area steril mushola pegawai yang terpisah dengan pengunjung sidang / masyarakat umum
2 Penerapan SPIP (3)	<b>3</b>	2,25	75,00%	Unit kerja telah membuat SK Penyelenggaraan SPIP Pada PN Pandeglang & Petunjuk Pelaksanaan SPIP dan dilakukannya pengawasan secara berjenjang oleh hakim pengawas bidang yang kemudian dilaporkan kepada WKPN sebagai koordinator Pengawasan dan telah dibuat Laporan dan monev oleh koordinator pengawasan (WKPN) kepada KPN
a. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	<b>B</b>	0,75		Unit kerja telah membentuk Tim Manajemen Resiko PN Pandeglang (SK KPN) dan telah melakukan penilaian risiko dengan membuat Dokumen matrik identifikasi, analisa dan level resiko serta membuat manual book sistem manajemen resiko PN Pandeglang
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas b. pelaksanaan kebijakan	<b>B</b>	0,75		

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	<b>B</b>	0,5	Unit kerja telah membentuk Tim Manajemen Resiko PN Pandeglang (SK KPN) dan telah melakukan penilaian risiko dengan membuat Dokumen matrik identifikasi, analisa dan level resiko serta membuat manual book sistem manajemen resiko PN Pandeglang
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	<b>A</b>	1	Unit kerja telah melakukan monev terhadap penilaian risiko yang kemudian telah merevisi dalam bentuk manual book sistem manajemen resiko PN Pandeglang. Sidak KPN (minimal 3 bulan sekali) terhadap uang perkara (perdata) dan uang belanja DIPA 01/03 (keuangan). Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang dan kegiatan apel pagi/sore.
3 Pengaduan Masyarakat (3)	3	2,62	87,50%
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	<b>B</b>	0,5	Telah melakukan Sosialisasi Siwas dan Maklumat KMA Nomor 01/Maklumat/KMA/9/2017 kepada Hakim dan ASN, menunjuk petugas dengan SK KPN Penanggung Jawab dan Petugas Meja Pengaduan. Laporan bulanan pengaduan pada PN Pandeglang Setiap bulan dilaporkan kepada Bawas MA dan Ditjen Badilum terkait status ada atau tidaknya laporan yang diterima baik pada aplikasi siwas maupun pada media pelaporan lainnya. Sarana pengaduan melalui Formulir Pengaduan di isi di meja pengaduan, melalui online (Aplikasi SIWAS) informasi pengaduan dapat dilihat pada browsur Pengaduan, Banner Siwas yang ada di PN Pandeglang

				Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut dilaksanakan tiap bulannya. Oleh karena selama ini laporan pengaduan yang masuk adalah NIHIL, maka tidak ada laporan pengaduan masyarakat yang harus dan segera ditindaklanjuti oleh unit kerja dalam hal ini KPN dengan membentuk tim pemeriksa.
b. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat		100	1	
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	A		1	Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan, Januari 2021 dengan hasil NIHIL tidak adanya laporan pengaduan yang masuk
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A		1	Hasil evaluasi atas pengaduan masyarakat yang NIHIL selama ini maka pimpinan menekankan kepada Hakim dan ASN untuk selalu menjaga kredibilitas dan senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik
4 Whistle-Blowing System (3)	3		2,62	87,50%
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	YA		1	<p>suatu adanya SK Pengawas dan Pelugas Aplikasi SIWAS dan telah pula dilakukan - Sosialisasi PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016, Sosialisasi Maklumat KMA Nomor 01 Tahun 2017 dan Pembinaan yang dilakukan pimpinan setiap bulan. Telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama awal tahun 2021</p> <p>suatu adanya SK Pengawas dan Pelugas Aplikasi SIWAS dan telah pula dilakukan - Sosialisasi PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016, Sosialisasi Maklumat KMA Nomor 01 Tahun 2017 dan Pembinaan yang dilakukan pimpinan setiap bulan. Telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama awal tahun 2021 dan Capture WBS pada aplikasi SIWAS</p>
b. b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan	B		0,5	

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan						
c. Whistle Blowing System	A	1				Evaluasi penerapan WBS dilaporkan setiap bulan bersamaan dengan laporan evaluasi pengaduan masyarakat dengan hasil nihil pada Mei 2021
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing						
d. System telah ditindaklanjuti	A	1				Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti dengan tidak adanya laporan pengaduan pada Mei 2021, dan pimpinan memberikan apresiasi dan arahan agar Hakim dan ASN senantiasa selalu menjaga kredibilitas dan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik.
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3	3	100,00%			
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan						
a. kepentingan dalam tugas fungsi utama	A	1				Adanya SK KPN tentang Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada PN Pandeglang
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah						
b. disosialisasikan/internalisasi	A	1				Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh Hakim dan ASN PN Pandeglang
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah						
c. diimplementasikan	A	1				CATATAN PERBAIKAN DARI EVALUATOR: Pelaksanaan benturan kepentingan telah diimplementasikan dalam unit kerja dengan adanya pembinaan secara berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan, sehingga dalam laporan setiap bulannya tidak ada kegiatan benturan kepentingan yang terjadi di PN Pandeglang Evaluasi telah dilakukan setiap bulan dengan adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi, dengan output tidak ditemukannya benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan PN Pandeglang Data yang diupload tidak sesuai dengan pertanyaan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan						
d. Benturan Kepentingan	A	1				Tindakan lanjut dari hasil evaluasi yang ada adalah, pimpinan memberikan apresiasi dan arahan agar Hakim dan ASN senantiasa selalu menjaga kredibilitas dan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik.
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan						
e. Kepentingan telah ditindaklanjuti	A	1				

6	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai	0	0 %	
	a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat			25 dari 25 orang Hakim, Panitera, Sekretaris dan Panitera Pengganti telah melaporkan LHKPN Tahun 2021
	a. Negara (LHKPN)	B		
	b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan			11 dari 11 orang ASN telah melaporkan LHKPN Tahun 2020
	b. Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	A		
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10	8,99	89,90%
	1 Standar Pelayanan (3)	3	2,25	75,00%
				unit kerja Pengadilan Negeri Pandeglang telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. <a href="https://drive.google.com/file/d/1gBVEy6CqZsIT9k9452RaUL-ZfifGtzwe/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1gBVEy6CqZsIT9k9452RaUL-ZfifGtzwe/view?usp=sharing</a>
	a. a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	B	0,5	
				Unit kerja Pengadilan Negeri Pandeglang telah memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; dalam hal ini selain SK KPN tentang Maklumat pelayanan Pengadilan Negeri Pandeglang telah pula memasang maklumat pelayanan yang dapat dilihat oleh Publik, Pengadilan Negeri Pandeglang telah pula memaklumkan Standar Pelayanan PTSP melalui brosur-brosur Pelayanan di Meja PTSP Perdata, Pidana, Hukum dan Umum, begitu juga terhadap alur-alur penanganan perkara pidana dan perdata baik di area Pengadilan Negeri dan juga di Website Pengadilan Negeri Pandeglang. <a href="https://drive.google.com/file/d/1UYKjpYnIJ0rbdG Gwx1wBA5aqSzukV8kA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UYKjpYnIJ0rbdG Gwx1wBA5aqSzukV8kA/view?usp=sharing</a>
	b. b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	A	1	

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A	1	<p>Unit kerja Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga terkait SOP terhadap pelayanan langsung di meja PTSP Pengadilan Negeri Pandeglang;  <a href="https://drive.google.com/file/d/1e7qYYMQfKj2GWHm85KMs09_Z1GSW8PrG/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1e7qYYMQfKj2GWHm85KMs09_Z1GSW8PrG/view?usp=sharing</a></p>
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	B	0,5	<p>Unit Kerja pengadilan Negeri Pandeglang telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP sesuai dengan ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP; Bahwa hal tersebut didukung oleh SK KPN tentang penunjukan Tim Reviu SOP, Tim Reviu telah melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi setiap tahun atau jika ada pembaharuan SOP;  <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVnxYfODIGlvj9kxM-CUqSxRWm8y4ZGg/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVnxYfODIGlvj9kxM-CUqSxRWm8y4ZGg/view?usp=sharing</a></p>
2 Budaya Pelayanan Prima (4)	4	3,74	93,40%

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam  
a. upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

A

1

Unit kerja Pengadilan Negeri Pandeglang telah melakukan beberapa sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; Telah dilakukan Sosialisasi bekerjasama dengan Bank BTN Cabang Cilegon dalam penerapan budaya pelayanan prima pada petugas front office, sosialisasi dari Pengadilan Tinggi Banten dalam penerapan Budaya pelayanan prima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten, Telah pula dilakukan training/pelatihan Petugas PTSP di wilayah PT Banten; Untuk Rencana aksi tahun 2021 PN.Pandeglang akan melakukan sosialisasi pada bulan April 2021.  
<https://drive.google.com/file/d/1YbjI5hVfFRGI4t9E-j0AtweKyP7DXY9e/view?usp=sharing>

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses  
b. melalui berbagai media

A

1

Informasi Pelayanan Pengadilan Negeri Pandeglang dapat diakses melalui berbagai media; telah pula dikeluarkan SK KPN terhadap struktur pelaksana pelayanan informasi dan Dokumentasi, SK KPN tentang Petugas dan penanggungjawab website dan operator website; dalam hal ini terdapat website PN Pandeglang yang memberikan informasi pelayanan dan informasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pandeglang dan lainnya yang selalu diupdate, terdapat Aplikasi penelusuran perkara dan denda tilang yang dapat didownload di playstore, brosur pelayanan PTSP yang tersedia di meja PTSP, benner Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Pandeglang, benner informasi alur perkara yang dapat dibaca oleh masyarakat di Pengadilan Negeri Pengadilan, adanya monitor jadwal sidang di area pengunjung untuk melihat jadwal sidang yang hari tersebut berlangsung; [https://drive.google.com/file/d/16\\_ViY9EUDHjhVMF3aXrBw\\_PVsg1xtLAI/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/16_ViY9EUDHjhVMF3aXrBw_PVsg1xtLAI/view?usp=sharing)



c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

A

1

Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar dan sudah diimplementasikan; telah dibuatkan pula SK KPN tentang pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar; hal tersebut telah dibuatkan SK KPN tentang Pemberian penghargaan kepada Hakim, Pegawai dan Honorer terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta pemilihan Role model sebagai dasar penilaian penjaminan mutu pengadilan Negeri Pandeglang terkait kinerja, produktifitas kerja, inovasi dan integritas yang bersangkutan;  
[https://drive.google.com/file/d/16q2AtBI02enxfi\\_nf5TIPXnHiaV4\\_mpdfr/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/16q2AtBI02enxfi_nf5TIPXnHiaV4_mpdfr/view?usp=sharing)

Evaluator tidak dapat meyakini data dukung

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

**B**

0,67

telah terdapat sarana layanan terpadu yaitu dengan terbentuknya pelayanan satu pintu (PTSP), Pojok E-court, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) , Aplikasi MIS dan telah terdapat SK KPN sebagai dasar hukum dan telah dimonitoring dan evaluasi, terdapat SK KPN tentang penunjukan petugas administrator aplikasi E-court dan terdapat meja pojok E-court, SK KPN terkait petugas penanggungjawab dan pengawas Aplikasi MIS, SK KPN tentang petugas SIPP dan telah dimonitoring dan dievaluasi, Penggunaan Aplikasi PTSP pada setiap meja pelayanan, pelayanan Antrian PTSP yang dahulu menggunakan Kartu Antrian kini telah menggunakan Mesin Antrian PTSP , terdapat pula Pemberitahuan anti gratifikasi yang telah dibuatkan SK KPN baik melalui Audio maupun di ruang persidangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim sebelum persidangan dimulai;  
<https://drive.google.com/file/d/1liWLTNc-9jAy2z8C-W9DE1UEg24zQDKw/view?usp=sharing>

Pengadilan Negeri Pandeglang telah melakukan inovasi pelayanan berupa; penerapan meja pojok e-court dan penggunaan Aplikasi E-court dalam pendaftaran perkara perdata, website Pn Pandeglang yang selalu diupdate, terdapat Pelayanan terhadap penyandang difabel, terdapat area pencegahan covid-19 dan benner pemberitahuan penggunaan masker, terdapat Mobil pelayanan Bank BTN, terdapat mesin EDC Bank BRI dan BTN, Aplikasi penelusuran perkara dan tilang (SIPERATI) di Playstore yang dapat didownload masyarakat, pengisian Survey Kepuasan Masyarakat melalui mesin pada area tunggu PTSP, terdapat Mesin Antrian PTSP, Aplikasi E-Brosur Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), Bahwa PN Pandeglang Memiliki Aplikasi 1. Aplikasi QR Code Barang Milik Negara (BMN) 2. Aplikasi QR Code Data Pegawai Yang Merupakan Inovasi PN Pandeglang Terkait Informasi Pelayanan Data Para Pegawai Dan terdapat mesin survey kepuasan Pelayanan yang dapat langsung diisi oleh masyarakat, terdapat kompensasi pelayanan apabila terjadi keterlambatan pelayanan;

e. e. Terdapat inovasi pelayanan	A	1	
3 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3)	3	3	100,00%

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat  
a. terhadap pelayanan

A 1

Sebagaimana rencana aksi area VI. terkait Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 Pengadilan Negeri Pandeglang akan melakukan survey kepuasan masyarakat empat kali dalam setahun yaitu Trisemester pertama adalah bulan Januari sampai bulan Maret, Trisemester Kedua pada bulan April sampai dengan bulan Juni, Trisemester ketiga pada bulan Juli sampai dengan September dan Trisemster keempat pada bulan September sampai dengan bulan Desember yang disebar kepada masyarakat yang menerima pelayanan di Pengadilan dan yang berada dilingkungan pengadilan;

Eviden tidak memuat hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat  
b. diakses secara terbuka

A 1

Bahwa hasil survey kepuasan masyarakat telah pula diupload di website Pengadilan Negeri Pandeglang serta di umumkan di area ruang tunggu Pengadilan sehingga dapat dilihat oleh masyarakat terkait Pelayanan di Pengadilan Negeri Pandeglang;  
<https://drive.google.com/file/d/1tkm94a7a98SdvGSudmzOhHAB-gxhRu6W/view?usp=sharing>  
Terhadap hasil survey kepuasan masyarakat telah pula di tindak lanjuti dan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Pandeglang;

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey  
c. kepuasan masyarakat

A 1

TOTAL PENGUNGKIT	60	55,59	92,65%
B. HASIL (40)	40	36,19	90,47%
1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20	19,14	95,70%

a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15	<b>3,77</b>	14,14	94,25%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Ush1TM-YuEQBYudMiQGm43NHH3oUm2AX/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Ush1TM-YuEQBYudMiQGm43NHH3oUm2AX/view?usp=sharing</a>	berdasarkan perhitungan penilaian skala 4 di dapat nilai 3,87 dari nilai 96,93
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5	<b>100</b>	5	100,00%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1rpVTPQjwLODh8S3JAYw0mj5KKtYaP9Bl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1rpVTPQjwLODh8S3JAYw0mj5KKtYaP9Bl/view?usp=sharing</a>	Tolong dilengkapi hasil pemeriksaan internal, contohnya laporan wasbid
2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20)	20		17,05	85,25%		
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)						
a. (20)	20	<b>3,41</b>	17,05	85,25%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1tkm94a7a98SdvGSudmzOhHAB-gxhRu6W/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1tkm94a7a98SdvGSudmzOhHAB-gxhRu6W/view?usp=sharing</a>	
<b>TOTAL HASIL</b>	<b>40</b>		<b>36,19</b>	<b>90,47%</b>		
<b>Nilai Pembangunan ZI</b>	<b>100</b>		<b>91,78</b>	<b>91,78%</b>		